

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Koalisi partai politik (parpol) yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat ini sangat kuat dan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau kebijakan Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif), karena dengan koalisi yang memiliki suara mayoritas di parlemen menyebabkan setiap kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan selalu disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) walaupun kebijakan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku (bermasalah), hal ini tentunya mengakibatkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) menjadi lemah.

B. Saran

1. Untuk Presiden dan Wakil Presiden (Pemerintah) kedepannya dalam membuat kebijakan harus selalu berhati-hati agar tidak menjadi masalah yang kemudian menimbulkan perpecahan.
2. Untuk partai-partai politik (parpol) yang ada, kedepannya harus bekerja sesuai dengan fungsinya (mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak hanya mementingkan kepentingan partai politiknya saja).
3. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kedepannya harus lebih profesional, agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan tegas sesuai dengan fitrahnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang.
4. Untuk Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang, agar kedepannya

dibuatkan Undang-Undang mengenai rangkap jabatan, agar setiap orang yang menjabat di posisi pemerintahan melepaskan jabatan yang dimilikinya di partai politik, sehingga setiap pejabat yang ada di pemerintahan dapat bekerja dengan profesional tanpa harus memikirkan kepentingan-kepentingan partai politiknya, begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah menjadi lebih efektif apabila yang diawasi bukan merupakan anggota atau pimpinan partai politiknya.